

DAFTAR PUSTAKA

- Educational Resources Information Center. (1982). *ERIC Processing Manual*. Washington DC.
- Hermanto, C. B. (2020). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Anggaran dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal AKRAB JUARA*.
- Hikmat, D. H. (2010). Monitoring dan Evaluasi Proyek.
- Kementerian Keuangan . (2020, Maret 23). Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN. *S-258/PB/2020*. Indonesia: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2020). PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2020, Juli 17). Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN. *S-614/PB/2020*. Indonesia: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kementerian Keuangan. (2021, Desember 17). *Retur SP2D, Antara Dilema dan Solusi*. Retrieved from Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3797-retur-sp2d,-antara-dilema-dan-solusi.html>

Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington DC: World Bank.

Mackay, K. (2010). Conceptual Framework for Monitoring and Evaluation. *The World Bank*.

- Moerdiyanto. (2009). Teknik Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Dalam Rangka Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen. 3.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rezariski, A. O. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Segal, G. F., & Summers, A. B. (2002). Citizens' Budget Reports: Improving Performance and Accountability in Government. *Reason Public Policy Institute, Policy Study 292*.
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.
- Suryanto, & Kurniati, P. S. (2019). Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- UN.ESCAP. (2009). *What is good governance?* Retrieved from <https://hdl.handle.net/20.500.12870/3794>